

ABSTRAK

Tri Anggis Hastari, 2025, Tinjauan Yuridis-Normatif Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Sby). Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H. (II) Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

Penelitian ini menganalisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby yang memidana Terdakwa II atas kelalaian pengawasan administratif. Penelitian bertujuan mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan wewenang yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan menganalisis dasar pertimbangan hakim. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan penyalahgunaan wewenang termanifestasi dalam dua bentuk: penyalahgunaan aktif oleh Terdakwa I dengan *mens rea* yang memenuhi unsur korupsi, dan kelalaian administratif pasif oleh Terdakwa II tanpa *mens rea* yang lebih tepat dikualifikasikan sebagai maladministrasi. Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan Teori Dasar Pertimbangan Hakim karena mengabaikan konteks sistemik dan mencampuradukkan kesengajaan dengan kelalaian. Putusan tidak sejalan dengan Teori Putusan Hakim dan Teori Pidana Pemidanaan karena tidak proporsional serta menciptakan *chilling effect*. Penelitian menyimpulkan putusan mencerminkan *over-criminalization* terhadap maladministrasi dan menciptakan preseden berbahaya yang mengaburkan batas kesalahan administratif dan tindak pidana. Saran meliputi perlunya regulasi yang membedakan maladministrasi dengan tindak pidana korupsi serta penguatan mekanisme *pre-trial*.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, *Maladministrasi*, *Mens rea*.

ABSTRACT

Tri Anggis Hastari, 2025, *Juridical-Normative Review of Judge's Decision on Corruption Crime (Case Study of Decision Number: 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby)*, University of PGRI Madiun. Advisor (I) Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H. (II) Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

This study analyzes the judicial decision in corruption case Number 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby which convicted Defendant II for administrative supervisory negligence. This research aims to identify forms of abuse of authority qualified as corruption and analyze the judge's rationale. The research employs statutory and case approaches. Findings reveal abuse of authority manifested in two forms: active abuse by Defendant I with mens rea fulfilling corruption elements, and passive administrative negligence by Defendant II without mens rea more appropriately qualified as maladministration. The judge's considerations are inconsistent with Judicial Consideration Theory for disregarding systemic context and conflating intentionality with negligence. The verdict contradicts Judicial Decision Theory and Criminal Punishment Theory for being disproportionate and creating chilling effects. The study concludes the verdict reflects over-criminalization of maladministration and establishes dangerous precedent blurring boundaries between administrative errors and criminal offenses. Recommendations include stricter regulations distinguishing maladministration from corruption and strengthening pre-trial mechanisms.

Keywords: *Corruption Crime, Maladministration, Mens rea*